BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2020

KABUPATEN KAUR

RABU,8 JANUARI 2020

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Ketua TPK DD Wayhawang Diperiksa

Pembuat Gambar Ikut Dipanggil

KOTA BINTUHAN – Kendati belum menentukan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa (DD) Wayhawang Kecamatan Maje tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp 280 juta lebih. Namun kemarin (7/1) penyidik Tipikor Polres Kaur kembali memeriksa sejumlah saksi dalam pembangunan pembukaan jalan sentral produksi dengan menggunakan DD tahun 2017 sebesar Rp 750 juta lebih.

Dua saksi yang diperiksa kemarin adalah Heru Sitagunang yang merupakan PNS PUPR Kaur sebagai pembuat gambar dan RAB untuk rencana pembangunan jalan sentral produksi tersebut. Heru diperiksa penyidik untuk memastikan spesifikasi dan RAB pembuatan jalan yang dikerjakan oleh Desa Wayhawang tahun 2017.

Selain Heru, penyidik kemarin juga melakukan pemeriksaan terhadap Ketua TPK (tim pelaksana kegiatan) DD Wayhawang tahun 2017 yaitu Sahlannur keduanya menjalani pemeriksaan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Dan proses pencairan dana yang dilakukan oleh kantan Kades Desa Wayhawang Midirlan.

"Ya hari ini dua lagi kita periksa saksi dari Desa Wayhawang, yang pertama pembuat RAB dan gambar kemudian ketua TPK yang melaksanakan kegiatan. Semua keterangan kita minta satu persatu agar semua jelas. Apalagi hasil audit BPK dan Inspektorat jelas kerugian negara Rp 280 juta lebih," tegas Kapolres Kaur AKBP Arief Hiayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman M.Si kepada **RB**.

Data terhimpun kerugian negara Rp 280 juta lebih tersebut di dapat dari kekurangan volume pada pembuatan jalan sentral produksi dan juga telford. Sehingga pekerjaan tidak sesuai dan tidak maksimal sesuai harapan masyarakat sehingga ada kerugian negara dari pembangunan jalan ini sekitar Rp 232 juta lebih. Kemudian ada selisih belanja BBM Rp 49,7 juta, kekurangan bayar pajak sewa buld dozer Rp 1 juta.

Kemudian ada juga kekurangan pajak sewa excavator sebesar Rp 562 ribu. Kemudian ada tiga item belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti yang totalnya mencapai Rp 51 juta lebih. "Untuk tersangka kita tunggu hasil pemeriksaan tuntas, karena sampai hari ini (kemarin red) baru empat saksi yang kita periksa. Masih ada sekitar 4 saksi lagi yang akan kita mintai keterangan dalam waktu beberapa hari ini," pungkas Iptu Ahmad Kairuman kepada RB. (**cik**)